

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN INTERNAL UNIVERSITAS MATARAM**



**Strategi *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Kawasan Pariwisata  
di Pulau Lombok**

Oleh :

- |  |                        |
|--|------------------------|
| <b>1. Agusdin SE., MBA., DBA</b>         | <b>NIDN 0013086403</b> |
| <b>2. Dr. Hermanto, MBA.</b>             | <b>NIDN 0023075806</b> |
| <b>3. Lalu M. Furkan SE., MM., Ph.D.</b> | <b>NIDN 0022107804</b> |

Dibiayai dari Sumber Dana DIPA BLU (PNBP) Universitas Mataram  
Tahun Anggaran 2021

**KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU  
MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

# DAFTAR ISI

## Halaman

DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
RINGKASAN	
<b>BAB I</b>	
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	5
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Khusus .....	9
1.4. Urgensi (keutamaan penelitian) Dalam Mengatasi Masalah Strategis	9
<b>BAB II</b>	
<b>Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>10</b>
2.1. Konsep Government dan Governance.....	11
2.2. Collaborative Governance.....	11
2.3. Governance Styles and Approaches.....	12
2.4. Governance and Networks.....	13
2.5. Policy Networks and Tourism Policy.....	13
<b>BAB III</b>	
<b>Metode Penelitian .....</b>	<b>14</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	14
3.2. Lokasi Penelitian.....	14
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	14
3.4. Penentuan Informan Kunci.....	15
3.5. Tehnik Pengumpulan Data.....	15
3.6. Alat Pengumpulan Data.....	15
3.7. Jenis dan Sumber Data.....	15
3.8. Prosedur Analisis Data.....	16
3.9. Bagan Alir Penelitian.....	16
<b>BAB IV</b>	
<b>Hasil Penelitian.....</b>	<b>17</b>
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	17
4.2. Kondisi dan Permasalahan Pengelolaan Kawasan Pariwisata Senggigi	25
4.3. Kondisi dan Permasalahan Pengelolaan Kawasan Pariwisata Sembalun	31
4.4. Strategi Pengelolaan Kawasan Pariwisata Senggigi dan Sembalun	34

<b>BAB V</b>	<b>Simpulan dan Rekomendasi.....</b>	<b>35</b>
	5.1. Simpulan.....	35
	5.2. Rekomendasi.....	35

**DAFTAR PUSTAKA**

**BIODATA PENELITI**

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1. Bagan Alir Penelitian	16

## RINGKASAN

Pengelolaan kawasan-kawasan pariwisata di Propinsi Nusa Tenggara Barat selama ini berada dibawah pemerintah kabupaten dan sebagai leading sektornya adalah Dinas Pariwisata kabupaten. Dinas pariwisata kabupaten berperan sebagai regulator sekaligus pengelola utama kawasan-kawasan tersebut, sedangkan stakeholders lainnya (asosiasi hotel dan restoran, asosiasi perjalanan wisata, tour guide, pelaku usaha kecil dan mikro penunjang pariwisata, kelompok masyarakat di sekitar kawasan pariwisata dan lain-lain) berperan sebagai mitra dari pemerintah yang membantu dalam pengelolaannya. Pelibatan stakeholders lainnya dengan optimal menggunakan konsep *collaborative governance* akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan bersama tentang masalah kompleks yang dihadapi. Pengelolaan kawasan pariwisata melibatkan banyak pemangku kepentingan dan memungkinkan para pemangku kepentingan ini untuk bekerja sama dan menyepakati solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi serta membantu pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi dan menemukan masalah dan memberikan tindakan korektif secara lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis skema kebijakan, permasalahan dalam implementasi kebijakan, peran pemerintah dan pihak-pihak terkait sebagai stakeholders utama dalam pengelolaan, dan peluang *collaborative governance* sebagai alternatif strategi dalam pengelolaan kawasan pariwisata yang ada di Pulau Lombok.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan dan prioritas di Indonesia maupun di Propinsi Nusa Tenggara Barat mengingat sektor ini merupakan kunci utama untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Urgensi (keutamaan) pelaksanaan penelitian ini adalah kebutuhan yang mendesak terhadap model strategi pengelolaan kawasan pariwisata untuk meningkatkan kinerjanya sehingga berdampak pada kesejahteraan pelaku usaha maupun masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Saat ini kinerja sektor pariwisata sedang mengalami penurunan yang disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 dan kondisi ekonomi yang sedang mengalami resesi.

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu 8 bulan yang terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu (1) **Tahap 1**, terdiri dari kegiatan observasi dan pengumpulan data sekunder (2) **Tahap 2**, melakukan indepth interview dan kajian literatur (3) **Tahap 3**, melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* dan analisis data. Penelitian dilakukan di 2 (dua) wilayah yang menjadi kawasan pariwisata utama di Pulau Lombok yaitu Kawasan Wisata Senggigi di wilayah kabupaten Lombok Barat dan Kawasan Wisata Sembalun di wilayah kabupaten Lombok Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam implementasi pengelolaan Kawasan Pariwisata Senggigi dan Sembalun dan peran pemerintah yang lebih dominan dan bersifat top-down. Hasil penelitian merekomendasikan strategi pengelolaan yang melibatkan para pihak (stakeholders) dengan mengadopsi 6 kriteria *collaborative governance* yaitu forum diprakarsai oleh badan publik; peserta forum terdiri dari aktor non-pemerintah; peserta terlibat dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya "berkonsultasi" forum diselenggarakan secara formal; forum bertujuan untuk mengambil keputusan berdasarkan konsensus; dan fokus kolaborasi pada kebijakan publik atau manajemen publik.

**Kata kunci:** *collaborative governance, tourism area, tourism policy, collaborative network, public sector management.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam melayani sebagian besar kebutuhan masyarakat, sektor publik dan swasta biasanya melakukannya secara sendiri-sendiri (independen). Ketika terdapat kebutuhan untuk melibatkan kedua sektor tersebut, metode digunakan biasanya dengan kontrak formal antara sektor publik dengan sektor swasta. Tata kelola adalah konsep yang lebih luas daripada pemerintah dan juga mencakup peran yang dimainkan oleh masyarakat dan sektor swasta dalam mengelola dan merencanakan negara, wilayah, dan kota. Pemerintahan kolaboratif melibatkan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk berkomunikasi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai lebih dari yang dapat dicapai oleh satu sektor apabila mengerjakannya secara sendiri-sendiri..

Ansell dan Gash (2008) mengatakan bahwa tujuan akhirnya adalah mengembangkan pendekatan kontingensi kolaborasi yang dapat menyoroti kondisi di mana collaborative governance akan lebih atau kurang efektif sebagai pendekatan untuk pembuatan kebijakan dan manajemen publik. Collaborative governance mencakup hubungan informal dan formal dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Proses kebijakan pemerintah konvensional dapat dikembangkan lebih luas dengan memfasilitasi kolaborasi antara sektor publik, swasta dan masyarakat. Collaborative governance membutuhkan tiga hal, yaitu: dukungan; kepemimpinan; dan forum. Dukungan mengidentifikasi masalah kebijakan yang harus diperbaiki dimana pimpinan mengumpulkan sektor-sektor ke dalam sebuah forum. Selanjutnya, anggota forum berkolaborasi untuk mengembangkan kebijakan, solusi, dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sektor publik.

Ansell dan Gash (2008) juga menyatakan bahwa:

Salah satu bentuk collaborative governance adalah “collaborative network” - sistem ini dimaksudkan untuk mencapai keselarasan antara kebutuhan masyarakat, strategi lembaga layanan, prioritas hasil, dan alokasi sumber daya. Skema ini juga dimaksudkan untuk membangun modal sosial; integrasi penyampaian layanan; dan strategi yang saling terkait untuk membangun hubungan, proses pembelajaran, serta pengukuran dan pemodelan di antara para peserta."

Pendekatan kolaboratif untuk pengaturan dan pengelolaan sektor publik telah berkembang di berbagai bidang, termasuk: perencanaan kota dan wilayah; administrasi dan hukum publik; pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan lingkungan. Collaborative governance muncul sebagai tanggapan atas kegagalan implementasi kebijakan pemerintah dari birokrasi menjadi kolaborasi dalam konteks jejaring antar komponen masyarakat. Meskipun keberadaan birokrasi masih tetap ada, pemerintah selaku pengelola sector publik mulai menyadari bahwa lebih banyak hal yang dapat dicapai melalui kolaborasi dan pembangunan jejaring antar pihak terkait. Kolaborasi dan kemitraan bukanlah hal baru dalam ranah politik, namun penggunaan gaya kepemimpinan ini secara luas telah mendapatkan pengakuan dalam beberapa tahun terakhir. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan collaborative governance sebagai berikut:

“Pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah dan yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik”.

Definisi diatas menunjukkan enam kriteria collaborative governance, yaitu (1) forum diprakarsai oleh badan publik; (2) peserta forum terdiri dari aktor non-pemerintah; (3) peserta terlibat dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya " berkonsultasi "; (4) forum diselenggarakan secara formal; (5) forum bertujuan untuk mengambil keputusan berdasarkan konsensus; dan (6) fokus kolaborasi pada kebijakan publik atau manajemen publik.

Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) juga mengembangkan definisi sebagai berikut: “Proses dan struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan orang-orang secara konstruktif melintasi batas-batas badan publik, tingkat pemerintahan, dan / atau ranah publik, swasta dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dilakukan dengan cara lain.”

Abbott (2012) melakukan studi terhadap perencanaan wilayah metropolitan di Queensland Tenggara (SEQ), Australia di mana pengaturan dengan skema collaborative governance antara pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal serta masyarakat regional telah berkembang selama periode 20 tahun yang mengarah pada keluaran dan hasil yang positif bahkan melampaui perencanaan tata guna lahan regional menurut undang-undang yang berlaku. Berikut adalah tiga rencana regional non-undang-undang dan dua rencana regional wajib yang disahkan; program infrastruktur yang terkait dengan anggaran negara; rencana sektoral regional untuk transportasi,

pasokan air, pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain; undang-undang baru dan pengaturan kelembagaan untuk pemerintahan metropolitan dan pekerjaan jaringan busway SEQ.

Keuntungan dari *collaborative governance* yang efektif adalah memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan bersama tentang masalah kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan memungkinkan para pemangku kepentingan ini untuk bekerja sama dan menyepakati solusi. Ini dapat membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi dan menargetkan masalah dan memberikan tindakan secara lebih efektif. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengembangkan solusi lebih cenderung menerima arahan yang diberikan atau keputusan yang dibuat.

Dengan demikian, hal ini dapat berfungsi sebagai cara untuk mengidentifikasi solusi kebijakan yang memiliki daya tarik lebih besar di masyarakat. Namun, kelemahan dari *collaborative governance* adalah prosesnya memakan waktu, mungkin tidak mencapai kesepakatan tentang solusi, dan instansi pemerintah terkait mungkin tidak melaksanakan solusi yang telah disepakati. Dalam struktur yang kompleks dengan banyak entitas yang bekerja bersama, peran individu dapat menjadi tidak jelas dan membingungkan. Beberapa individu bertindak sebagian besar dalam kapasitas pribadi, sementara yang lain mungkin bertindak atas nama agensi atau organisasi. Kelompok pemangku kepentingan yang kuat mungkin berusaha untuk memanipulasi proses tersebut. Masalah struktural juga mempengaruhi agenda dan hasil. Struktur terbuka dengan kepemimpinan dan keanggotaan yang longgar memungkinkan banyak peserta mendapatkan akses ke agenda yang sedang dicarikan solusinya. Mencapai tujuan dalam agenda seluas itu menjadi lebih sulit karena semakin banyak pemain yang berjuang untuk menyelesaikan perbedaan dan mempengaruhi keputusan.

Kawasan-kawasan Pariwisata yang ada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat terutama yang berada di wilayah Pulau Lombok seperti Kawasan Pariwisata Sembalun dan sekitarnya yang berada di wilayah kabupaten Lombok Timur, Kawasan 3 Gili dan sekitarnya di wilayah kabupaten Lombok Utara, dan Kawasan Senggigi dan sekitarnya dan Kawasan Pariwisata Sekotong di wilayah kabupaten Lombok Barat merupakan kawasan-kawasan pariwisata unggulan yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun ,mancanegara. Pengelolaan kawasan-kawasan pariwisata tersebut selama ini berada dibawah pemerintah kabupaten dan sebagai leading sektornya adalah Dinas Pariwisata kabupaten. Selama ini dinas pariwisata kabupaten berperan sebagai regulator sekaligus pengelola utama kawasan-kawasan tersebut,

sedangkan stakeholders lainnya (asosiasi hotel dan restoran, asosiasi perjalanan wisata, tour guide, pelaku usaha kecil dan mikro penunjang pariwisata, kelompok masyarakat di sekitar kawasan pariwisata dan lain-lain) berperan sebagai mitra dari pemerintah yang membantu dalam pengelolaannya. Padahal dengan melibatkan stakeholders lainnya dengan optimal dengan konsep collaborative governance akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan bersama tentang masalah kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan memungkinkan para pemangku kepentingan ini untuk bekerja sama dan menyepakati solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Ini dapat membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi dan menemukan masalah dan memberikan tindakan korektif secara lebih efektif.

Berdasarkan fenomena tersebut pemerintah berfungsi sebagai regulator sekaligus pengelola kawasan-kawasan pariwisata yang ada di Pulau Lombok, sedangkan stakeholders lainnya tidak mendapatkan peran yang signifikan terutama dalam ikut berkontribusi dalam pengambilan keputusan terhadap regulasi maupun ikut terlibat dalam pengelolaan kawasan-kawasan pariwisata tersebut. Berdasarkan konsep teori yang terkait dan fenomena keberhasilan penerapan konsep collaborative governance dalam pengelolaan sektor publik di berbagai wilayah di seluruh dunia, maka penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi collaborative governance dalam pengelolaan kawasan pariwisata yang ada di Pulau Lombok perlu dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi pengetahuan dan hasil riset untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam pengelolaan sektor publik.

## **1.2. Perumusan Masalah**

1. Apakah skema yang diimplementasikan dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata di Pulau Lombok?
2. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata di Pulau Lombok?
3. Bagaimana peran pemerintah dan para pihak (stakeholders) dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata di Pulau Lombok?
4. Apakah strategi *collaborative governance* dapat diterapkan sebagai alternatif strategi dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata di Pulau Lombok?



### **1.3. Tujuan dan Manfaat Khusus**

1. Menganalisis skema kebijakan pengelolaan Kawasan Pariwisata yang ada di Pulau Lombok sebagai informasi awal untuk keperluan analisis selanjutnya
2. Menganalisis permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan Kawasan Pariwisata yang ada di Pulau Lombok untuk mengetahui kondisi saat ini dan permasalahan implementasi kebijakan yang diterapkan sehingga para pihak terutama pemangku kebijakan mendapat informasi faktual sebagai dasar merumuskan kebijakan selanjutnya dimasa depan;
3. Menganalisis peran pemerintah dan pihak-pihak terkait sebagai stakeholders utama dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata yang ada di Pulau Lombok sebagai pijakan awal dalam membenahi pengelolaannya;
4. Menganalisis peluang collaborative governance sebagai alternatif strategi dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata yang ada di Pulau Lombok sehingga diperoleh rekomendasi strategi dibutuhkan untuk pengelolaan Kawasan Pariwisata yang ada di Pulau Lombok.

### **1.4. Urgensi (keutamaan penelitian) dalam mengatasi masalah strategis**

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan dan prioritas di Indonesia maupun di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengembangkan sektor ini karena merupakan kunci utama untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Urgensi (keutamaan) pelaksanaan penelitian ini adalah kebutuhan yang mendesak terhadap model strategi pengelolaan kawasan pariwisata untuk meningkatkan kinerjanya sehingga berdampak pada kesejahteraan pelaku usaha maupun masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Dibutuhkan strategi peningkatan kinerja kawasan pariwisata dalam mendukung kinerja sektor pariwisata yang saat ini sedang mengalami penurunan yang disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 dan kondisi ekonomi yang sedang mengalami resesi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Government dan Governance**

Istilah 'governance' pertama kali dikenal pada akhir tahun 1980-an dalam laporan Bank Dunia dan kemudian dikenal oleh dunia akademik sejak 1990-an dan seterusnya (Hall, 2011). Mayntz (2003) menyatakan bahwa akar dari istilah governance dapat ditelusuri kembali ke politik pasca-Perang Dunia II, ketika negara-negara Barat mencari cara untuk beralih dari sistem intervensionis dan pengendalian oleh negara ke pemerintahan modern sebagai cara untuk menavigasi sosio- pertumbuhan ekonomi. Kluvánková-Oravská et al (2009: 187) berpendapat bahwa pemerintah mengacu pada "aktivitas hierarki badan-badan terpusat. Governance memungkinkan keterlibatan berbagai aktor yang independen dari kekuasaan pusat dan diimplementasikan pada berbagai tingkat pengambilan keputusan".

Penggunaan istilah '*government to governance*' tampaknya kurang relevan, karena 'government' mengacu pada institusi, dan 'governance' merujuk pada tindakan atau tindakan pemerintahan oleh pemerintah dan / atau oleh institusi lain. Dengan demikian, menempatkan government (lembaga) dan governance (tindakan) dalam konteks yang sama akan membingungkan. Menurut Liu (2014), terdapat berbagai jenis tata kelola dari hierarki hingga tata kelola komunitas. Oleh karena itu, istilah governance sendiri tidak menunjukkan jenis pemerintahan.

#### **2.2. Collaborative Governance**

Ansell dan Gash (2008) mengatakan bahwa collaborative governance mencakup hubungan informal dan formal dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Proses kebijakan pemerintah konvensional dapat dikembangkan menjadi lebih luas dengan memfasilitasi kolaborasi antara sektor publik, swasta dan masyarakat. Collaborative governance membutuhkan tiga hal, yaitu: dukungan; kepemimpinan; dan forum. Dukungan dalam mengidentifikasi masalah kebijakan yang harus diperbaiki dimana pemerintah mengumpulkan sektor-sektor ke dalam sebuah forum. Selanjutnya, anggota forum berkolaborasi untuk

mengembangkan kebijakan, solusi, dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sektor publik.

Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan collaborative governance sebagai berikut:

“Pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah dan yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik”.

Definisi diatas menunjukkan enam kriteria collaborative governance, yaitu (1) forum diprakarsai oleh badan publik; (2) peserta forum terdiri dari aktor non-pemerintah; (3) peserta terlibat dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya " berkonsultasi "; (4) forum diselenggarakan secara formal; (5) forum bertujuan untuk mengambil keputusan berdasarkan konsensus; dan (6) fokus kolaborasi pada kebijakan publik atau manajemen publik. Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) juga mengembangkan definisi sebagai berikut:

“Proses dan struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan orang-orang secara konstruktif melintasi batas-batas badan publik, tingkat pemerintahan, dan / atau ranah publik, swasta dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dilakukan dengan cara lain.”

### **2.3. Governance Styles and Approaches**

Sebagai bidang manajemen sektor publik yang relatif baru, pengelolaan terpadu kepariwisataan berbasis budaya di wilayah perkotaan diperlukan pengaturan pengelolaan yang inovatif. “Governance” berbeda dari bentuk pemerintahan tradisional dengan menyertakan aktor yang tidak hanya mewakili sektor publik, tetapi juga pihak swasta dan sukarelawan dalam pengambilan keputusan kebijakan perkotaan, dan yang paling sering dilakukan adalah melalui kemitraan sector publik-swasta (Svensson et al, 2005). Sejumlah studi (Barcon, 2003; Paskaleva-Shapira, 2000; Le Galès, 2003) menyoroti peran otoritas lokal dalam mengidentifikasi pelaku dan pemimpin untuk membuat kemitraan atau mitra kolaborasi, termasuk untuk pengembangan pariwisata di wilayah perkotaan.

Palmer (1998) merekomendasikan kontinum "loose-tight" untuk mengelola hubungan antar dan intra-organisasi. Gaya “loose” governance mengacu pada jenis kemitraan yang bergantung pada sistem aturan yang ditentukan atau beberapa bentuk intervensi hukum. Proses governance dalam pariwisata budaya di wilayah perkotaan sebagian besar “loose” dan seringkali tidak

berkelanjutan, terutama di wilayah kota-kota kecil dan menengah di mana pengembangan pariwisata bersifat sporadis dan terfragmentasi (Enriquez-Savagnac, 1997).

## **2.4. Governance and Networks**

Istilah 'governance' memiliki pengertian yang sangat luas dan telah menjadi perdebatan dan diskusi yang mendalam dalam literatur (Peters, 2000; Pierre, 1998, 2000; Pierre & Peters, 2000). Pergeseran dari 'government' ke 'governance' (Montin & Hedlund, 2009) menunjukkan bahwa sektor publik tidak lagi memiliki hak monopoli atau sumber daya untuk pembuatan kebijakan, akan tetapi tetap menjadi aktor utama. Pemikiran tentang governance bersifat multi-dimensi dan mencakup gagasan tentang kekuasaan, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas dari sudut pandang aktor-sentris: “tata kelola menentukan siapa yang memiliki kekuasaan, siapa yang membuat keputusan, bagaimana pemain lain membuat suara mereka didengar dan bagaimana akun diberikan ”(Institute on Governance [IOG], 2018). Lebih lanjut, Beaumont dan Dredge (2010) mendefinisikan governance sebagai "semua bentuk hubungan organisasi." Fokus hubungan dioperasionalkan dalam konsep jejaring (network).

Ansell dan Gash (2008) juga menyatakan bahwa:

Salah satu bentuk collaborative governance adalah “collaborative network” - sistem ini dimaksudkan untuk mencapai keselarasan antara kebutuhan masyarakat, strategi lembaga layanan, prioritas hasil, dan alokasi sumber daya. Skema ini juga dimaksudkan untuk membangun modal sosial; integrasi penyampaian layanan; dan strategi yang saling terkait untuk membangun hubungan, proses pembelajaran, serta pengukuran dan pemodelan di antara para peserta."

## **2.5. Policy Networks and Tourism Policy**

Kompleksitas sistem pengelolaan pariwisata tercermin dalam interaksi berbagai aktor, baik yang berasal dari sektor publik maupun sektor swasta dan pemain semi-pemerintah (Novelli et al, 2006). Justru karena ada variasi yang cukup besar antara peran agen-agen ini, belum lagi tugas yang mereka lakukan atau produk yang mereka hasilkan dan pasarkan, ada kebutuhan kerja sama yang tinggi di antara mereka dalam upaya, misalnya, untuk terlibat secara efektif dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi (Bramwell, 2011) atau untuk mempromosikan pariwisata secara berkelanjutan (Farmaki, 2015). Pengaturan jejaring dapat “diasumsikan bermanfaat bagi destinasi melalui promosi proses perencanaan yang terintegrasi, pengambilan keputusan yang inklusif dan peningkatan sinergi dan dengan demikian mendukung gagasan keberlanjutan”

(Farmaki, 2015, h. 386). Fakta bahwa struktur governance seringkali menunjukkan ketidakadilan di antara berbagai pemangku kepentingan yang ditunjukkan oleh tidak adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam pengaturan tersebut. Moscardo (2011), dalam sebuah studi tentang destinasi wisata di Afrika menemukan bahwa penduduk atau komunitas di sekitar destinasi sangat jarang terlibat dalam pengaturan tata kelola pariwisata akan tetapi tata kelolanya didominasi oleh pihak luar baik dari sektor publik maupun swasta.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha menggali secara mendalam informasi yang diberikan oleh informan kunci. Hal terpenting dalam penelitian kualitatif adalah kedalaman informasi yang diberikan oleh informan kunci.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini adalah beberapa Kawasan Pariwisata yang ada di Pulau Lombok yaitu Kawasan Pariwisata Sembalun di wilayah kabupaten Lombok Timur dan Kawasan Pariwisata Senggigi di wilayah kabupaten Lombok Barat. Kawasan-kawasan pariwisata tersebut terpilih karena merupakan kawasan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan oleh masing-masing kabupaten yang ada di Pulau Lombok.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara mendalam (indepth interview), dan Focus Group Discussion (FGD). Observasi dilakukan terhadap kawasan-kawasan pariwisata beserta infrastruktur penunjang lainnya, kemudian in-depth interview dan FGD dilakukan dengan informan kunci terpilih seperti asosiasi-asosiasi pariwisata seperti Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perjalanan Wisata (ASITA), Asosiasi Tour Guide, dan Pelaku Usaha Pariwisata dan Penunjang Pariwisata serta perwakilan kelompok masyarakat pada kawasan pariwisata tersebut. Indepth interview dan FGD berusaha mendapatkan informasi terkait kebijakan pemerintah kabupaten dan aspirasi dari stakeholders tentang strategi pengelolaan yang dibutuhkan pada kawasan-kawasan pariwisata tersebut. Keseluruhan informasi di catat dan di rekam. Hal hal yang belum jelas ditanyakan kembali kepada para informan kunci sehingga diperoleh informasi yang lengkap untuk kebutuhan analisis.

### **3.4 Penentuan Informan kunci**

Penentuan informan kunci dipilih berdasarkan pihak-pihak yang paling memahami tentang kebijakan dan pelaku-pelaku pariwisata yang terlibat pada kawasan-kawasan pariwisata tersebut.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil observasi diperoleh gambaran tentang kegiatan pengembangan kawasan pariwisata. Setelah itu kemudian menggali dan mengkonfirmasi dampak kebijakan dan pengalaman yang dialami kepada informan kunci. In-depth interview dan FGD dengan informan kunci menggunakan panduan pertanyaan terstruktur.

### **3.6 Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif instrumen pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berusaha mendapatkan informasi secara penuh. Jika jawaban dianggap belum menjawab pertanyaan, maka peneliti dapat bertanya kembali sehingga tujuan dapat tercapai. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan FGD dengan para informan kunci. Data sekunder diperoleh dari publikasi maupun data terdahulu yang telah diterbitkan oleh para peneliti sebelumnya atau hasil publikasi lainnya.

### **3.7 Jenis data**

- **Data kualitatif**

Data yang tidak dapat diukur atau dinyatakan dengan besaran tertentu baik berupa satuan ukur, satuan hitung maupun satuan moneter akan tetapi diukur dengan menggunakan kalimat atau keterangan

- **Data kuantitatif**

Data yang berbentuk angka dimana besarnya bisa diukur secara langsung

### 3.8. Sumber Data

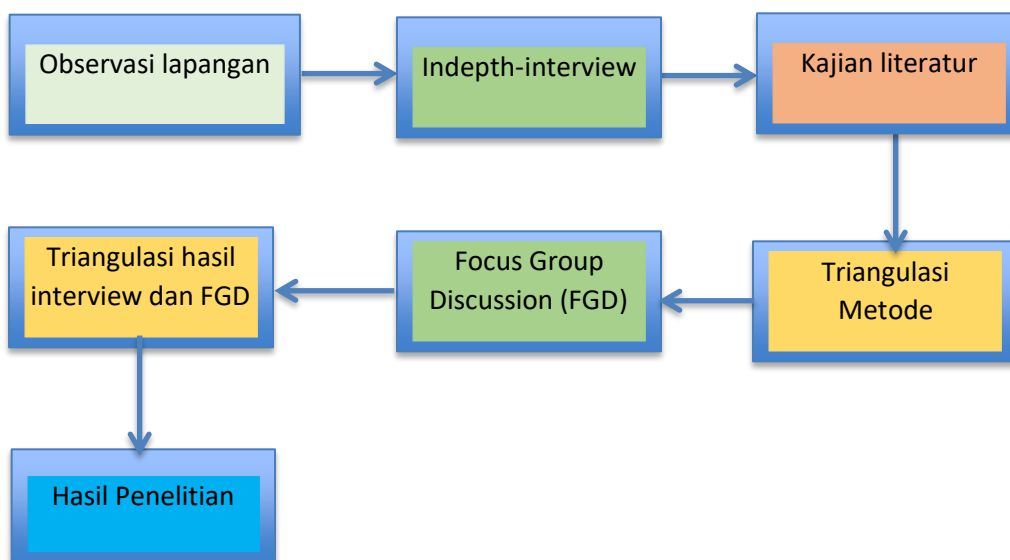
- Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan kunci dan merupakan respon langsung informan terhadap pertanyaan yang diajukan maupun kesimpulan hasil indepth interview maupun FGD.
- Data sekunder yakni data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah dihimpun dan dilaporkan oleh pihak pihak tertentu seperti instansi poemerintah yang terkait..

### 3.9. Prosedur Analisis Data.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan dukungan data sekunder dilakukan indepth interview menggunakan panduan atau daftar pertanyaan terstruktur yang sudah dipersiapkan. Data yang telah dikumpulkan secara kualitatif menggunakan metode indepth interview dikaji berdasarkan konsep teori dan melakukan triangulasi metode dan dilanjutkan dengan melaksanakan FGD dengan kelompok informan kunci. Pelaksanaan FGD di rekam dan dicatat sebagai bukti, kemudian.hasil rekaman dan catatan dianalisis untuk melakukan triangulasi hasil indepth interview dan FGD sebagai dasar untuk menentukan hasil dan merumuskan rekomendasi penelitian.

### 3.10 Bagan Alir Penelitian

**Gambar 3.1**  
**Bagan Alir Penelitian**





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **4.1.1. Kawasan Pariwisata Senggigi**

Pantai Senggigi merupakan area resort yang paling tua dan paling terkenal di Pulau Lombok. Pantai ini memiliki ciri khas pasir putih dengan garis pantai yang panjang. Pantai ini terletak di sebelah utara Kota Mataram dengan Jarak 10 km atau sekitar 10 menit perjalanan. Lokasi ini menawarkan pantai laguna, panorama alam perbukitan yang mengelilingi lokasi obyek serta pemandangan Sunset yang sangat indah. Disamping itu juga, di lokasi obyek wisata Pantai Senggigi sering digunakan sebagai tempat melaksanakan event – event budaya seperti festival Senggigi. Fasilitas yang ada sudah cukup memadai dari hotel bintang dan melati, art shop, restaurant dan hiburan umum.

Pantai Senggigi terletak di Desa Senggigi Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Senggigi mencakup Dusun Loco, Dusun Senggigi, Dusun Kerandangan serta Dusun Mangsit. Secara administratif, kawasan ini dibatasi oleh: sebelah barat : Selat Lombok, sebelah selatan : Senteluk dan Desa Sandik, sebelah timur : Desa Lembah Sari, sebelah utara : Desa Malaka Kecamatan Pemenang (Kabupaten Lombok Utara). Secara geografis, Kawasan Wisata Senggigi merupakan desa yang wilayahnya diapit oleh Pantai Senggigi di bagian Barat dan bukit Senggigi di bagian Timur. Jumlah penduduk Desa Senggigi yaitu sebanyak 4.090 jiwa, terdiri dari 2.031 penduduk laki-laki dan 2.059 penduduk perempuan. Sebagian besar penduduk Desa Senggigi bermata pencarian dari sektor pertanian, perikanan dan jasa. Pantai Senggigi menjadi salah satu andalan objek wisata di Kabupaten Lombok Barat. Festival Senggigi merupakan pesta adat masyarakat Lombok Barat pada khususnya dan masyarakat NTB pada umumnya. Festival Senggigi merupakan suatu sistem budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Lombok Barat. Dengan menonjolkan kegiatan seni budaya daerah, sekaligus merupakan arena apresiasi budaya bangsa di Kabupaten Lombok Barat, NTB. Festival Senggigi dapat menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah tujuan wisata. Sejak diselenggarakannya Festival Senggigi sebagai pesta adat budaya masyarakat Lombok Barat pada khususnya dan masyarakat NTB pada umumnya.

#### **4.1.1.1. Obyek Wisata Favorit Pantai Senggigi**

Ada banyak alasan mengapa pantai Senggigi menjadi salah satu destinasi wisata favorit di kalangan para penggemar perjalanan mancanegara. Para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Senggigi lebih senang menghabiskan waktu mereka untuk berenang, berjemur, snorkeling, atau hanya sekedar bermain di tepi pantai. Air laut di pantai ini yang sangat jernih akan membuat wisatawan dapat langsung melihat kawanan ikan dengan bebas. Pantai Senggigi merupakan objek wisata air yang menarik bagi wisatawan yang menyukai laut sebagai pilihan tujuan untuk berwisata. Perjalanan ke pantai ini juga akan memberikan pengalaman wisata yang dipercaya akan membuat wisatawan menjadi rindu berkunjung ke pantai ini.

##### **a. Wisata Sunset View**

Pada sore hari, wisatawan bisa melepaskan penat sambil bersantai di tepi pantai sembari menikmati panorama matahari terbenam.



## **b. Wisata Snorkeling**

Kehidupan terumbu karang di pantai ini masih terpelihara sampai saat ini. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan tempat wisata di pulau Lombok ini menjadi destinasi snorkeling yang diminati oleh berbagai kalangan. Hal tersebut didukung dengan air laut di Senggigi yang ombaknya tidak terlalu besar sehingga para pengunjung tidak perlu khawatir terbawa arus pada saat snorkeling. Menyelam di alam bawah laut pantai Senggigi akan sangat mengesankan dan dapat menemukan keindahan laut yang sangat alami. Pantai ini mempunyai garis pantai yang panjang nan indah dipandang.



**c. Wisata Jogging dan Yoga**

Selain menyelam, wisatawan dapat melakukan aktivitas jogging atau yoga karena pantai ini memiliki garis pantai yang panjang.



**Jogging dan Yoga di Pantai Senggigi**

#### **4.1.2. Kawasan Pariwisata Sembalun**

Pesona Kawasan Pariwisata Sembalun Lombok Timur terletak pada alamnya yang indah, meskipun juga ada wisata budaya yang menarik untuk dikunjungi. Berikut beberapa obyek wisata utama sebagai pesona dan daya Tarik Kawasan Pariwisata Sembalun:

##### **1. Desa Adat Belek Suku Sasak**

Pada desa adat ini terdapat rumah tradisional suku Sasak, yaitu suku asli dari Nusa Tenggara Barat. Rumah tersebut adalah rumah yang pertama didirikan dan tertua di desa Sembalun, maka dari itu dinamakan desa belek artinya desa besar. Keunikannya adalah, rumahnya berjumlah 7 buah, dengan 7 tangga masuk ke dalam, dan 7 Para yaitu, tempat penyimpanan barang-barang. Di desa Belek selain terdapat 7 rumah adat ada 2 lumbung yang berfungsi untuk menyimpan hasil panen. Sangat menarik untuk dikunjungi, karena selain melihat keunikannya kamu bisa belajar sejarah dan cerita dibalik rumah desa Belek.



## **2. Kebun Strawberry**

Dari salah satu hamparan sawah warna-warni yang indah yang ada di desa Sembalun, terdapat kebun strawberry yang luas. Kebun tersebut dijadikan wisata petik buah, sehingga pengunjung bisa memetik sendiri buah strawberry di sana. Kamu bisa langsung memakannya di tempat, rasa buah yang asam-asam nikmat, akan membuatmu ketagihan.



**Kebun Strawberry di Sembalun (sumber ig @nahwanhadi)**

## **3. Rumah Tenun Sembalun**

Ternyata pesona desa Sembalun tidak hanya pada wisata alamnya saja, tapi juga ada wisata budaya yang ada di sana. Ada sebuah rumah tenun yang dimiliki desa Sembalun, yang bisa dijadikan wisata budaya oleh pengunjung. Di tempat tersebut bisa melihat langsung dan mencoba menenun kain khas Lombok. Para wanita di Lombok, harus bisa menenun sebelum diijinkan menikah, jadi kain tenun tetap lestari di sana. Kamu juga bisa membeli kain dari hasil tenun desa Sembalun.

#### 4. Bukit Selong

Bukit Selong adalah salah satu bukit yang ada di desa Sembalun yang dijadikan spot melihat sunrise. Selain melihat indahnya sunrise, kamu juga bisa melihat salah satu pesona yang terkenal di desa Sembalun yaitu, hamparan sawah warna-warni. Pemandangan sawah yang tertata rapih dengan latar belakang perbukitan, membuat kagum yang melihatnya.



## 5. Bukit Siswa Untuk Paralayang

Di Desa Sembalun juga ada bukit untuk melakukan paralayang, yaitu bukit Siswa Paralayang. Dari bukit ini bisa melihat langsung pemandangan gunung Rinjani yang tersohor itu. Melakukan paralayang sambil menikmati pemandangan perbukitan dan gunung Rinjani yang tak terlupakan. Desa Sembalun sebagai pintu masuk ke gunung Rinjani, memang terkenal dengan perbukitannya yang menawan.





## **4.2. Kondisi dan Permasalahan Pengelolaan Kawasan Pariwisata Senggigi**

### **Pengantar Diskusi oleh Mastur, SE. (Kepala Desa Senggigi)**

Menekankan pentingnya membangun kembali kawasan wisata Senggigi menjadi tujuan wisata utama agar dapat bersaing dengan wilayah KEK Mandalika. Senggigi sedang mengembangkan 4 kawasan yaitu dusun Mangsit, dusun Kerandangan, dusun Senggigi, dan dusun Loco. Dusun Mangsit mengembangkan pasar tradisional, taman trigona, dan shop tracking, dusun Kerandangan mengembangkan atraksi budaya, wisata ketangkasan, dan wisata alam/air terjun, dusun Senggigi mengembangkan argo wisata dan wisata relegius, dan dusun Loco mengembangkan wisata kuliner dan Bike Park.

### **Pemaparan Narasumber 1 (Agusdin, SE., MBA., DBA)**

Pengembangan Pariwisata (Business Survival) di Era Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai aspek termasuk pariwisata khususnya di bidang hotel, restoran, travel, spa dll. Untuk menanggapi hal ini, diperlukan pola pikir yang baik dan kreatif agar dapat berinovasi di era pandemi. Pentingnya melihat peluang dan pembuatan strategi baik strategi jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan platform online di era pandemi ini dan juga melakukan pemetaan kondisi saat ini agar dapat membuat perencanaan yang baik, dan pentingnya peran pemerintah selaku pemangku kepentingan.

Penerapan collaborative governance yaitu kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal. 6 kriteria collaborative governance: forum diprakarsai oleh badan publik; peserta forum terdiri dari aktor non-pemerintah; peserta terlibat dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya "berkonsultasi" forum diselenggarakan secara formal; forum bertujuan untuk mengambil keputusan berdasarkan konsensus; dan fokus kolaborasi pada kebijakan publik atau manajemen publik. Beberapa keuntungan dari collaborative governance, yaitu dapat meningkatkan pemahaman bersama dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat disepakati solusi, membantu pemerintah mengidentifikasi masalah dari bawah (grassroot), keberterimaan antara stakeholders terhadap keputusan akan lebih tinggi. Sedangkan kelemahannya termasuk: proses memakan waktu, challenge menemukan solusi, mungkin ada manipulasi proses, politik pengambilan keputusan, peran individu menjadi tidak jelas. Permasalahan yang dikadapi dalam pengelolaan Kawasan pariwisata saat ini adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan oleh pemerintah sebagai regulator;

- Stakeholders lainnya sebagai mitra pemerintah dan kurang berperan dalam pengambilan keputusan maupun terlibat dalam pengelolaan kawasan;
- Penanganan masalah cenderung bersifat top-down, kurang melibatkan masyarakat atau pemangku kepentingan non-pemerintah;
- Kurangnya kerjasama dan koordinasi antar stakeholders dan cenderung berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi masalah.

### **Pemaparan Narasumber 2 (Ahmad Saufi, S.E., M.Bus., Ph.D)**

Pentingnya membangun Profil Senggigi dengan menentukan profil Senggigi seperti apa yang ingin dibangun ke depannya agar dapat bangkit lagi karena setiap daerah harus memiliki karakteristiknya masing-masing dan tidak hanya ikut-ikutan. Hal-hal penting yang perlu dilakukan/diperhatikan yaitu pembuatan strategi dari bawah (membangun strategi dari level masyarakat); kepemimpinan yang memiliki jiwa kewirausahaan; networking; champion desa/destinations (pemberdayaan pemuda). Masukan untuk pengembangan atraksi budaya dusun Kerandangan: perlu "pengelola" yang mampu melihat pasar dan mengelola performance budaya yang akan ditampilkan. Selain itu juga pemanfaatan siswa SD juga dapat dilaksanakan dalam initial projet sebelum berikutnya dilanjutkan dan dikembangkan dengan keterlibatan professional artists.

### **Pemaparan Narasumber 3 (L. M. Furkan, SE., MM. Ph.D).**

Pentingnya Adaptasi dan Inovasi dalam Pariwisata yaitu pentingnya melihat kesempatan di tengah era disrupsi, harus dapat menyesuaikan dengan perubahan yaitu dengan berinovasi dan adaptasi, serta jangan menjadikan perubahan menjadi suatu hal yang negative. Business life cycle ada 4 stages (diperkenalkan, berkembang, dewasa, penurunan), inovasi menjadi kunci untuk bisnis berkelanjutan, pentingnya kolaborasi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, instansi pendidikan, masyarakat, media, dan lain-lain. Inovasi yang harus dilakukan: new service concept, new customer interface, new delivery concept, dan new technology option. Wilayah Bali, NTB dan NTT menjadi pusat pengembangan pariwisata sesuai dengan kebijakan nasional. Mandalika dan Senggigi penting untuk pariwisata NTB, pentingnya networking untuk promosi pariwisata.

## **Hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan Stakeholders pelaku pariwisata**

### **Topik Diskusi:**

1. Apakah skema yang diimplementasikan dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata Senggigi?
2. Apa permasalahan dalam implementasi pengelolaan Kawasan Pariwisata Senggigi?
3. Bagaimana peran pemerintah dan stakeholders dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata Senggigi?
4. Apa strategi yang paling memungkinkan dalam implementasi pengelolaan Kawasan Pariwisata Senggigi?

### ***Peserta 1: Ketut Jaya (GM Holiday Resort, Senggigi)***

Menanggapi terkait penguatan profil Senggigi dengan mempertanyakan bagaimana *marketing differentiation* Senggigi yang dapat dibangun. Peluang memajukan Senggigi adalah bahwa Senggigi merupakan salah satu destinasi wisata yang hidup dan masih berjalan di era pandemi, dan juga Senggigi telah memiliki kesiapan untuk berkolaborasi dengan para pemangku kebijakan lainnya. Namun, kendala dalam pemajuan Senggigi yaitu terkait penataan wilayah.

### ***Peserta 2: Suhermanto (ketua APH)***

Senggigi sedang mengalami stagnasi pariwisata. Tujuan menjadikan Senggigi sebagai destinasi unggulan lagi terkendala beratnya dampak pandemi Covid-10 khususnya dengan adanya aturan pembatasan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu kendalanya adalah adanya keterbatasan penyerapan anggaran daerah Senggigi dan tingginya pungutan pajak di masa pandemi. Suhermanto menyarankan adanya perubahan nama menjadi kecamatan "Batu Layar Senggigi" atau sejenisnya yang memasukkan unsur nama "Senggigi" agar bisa mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar mengingat Senggigi adalah salah satu penyumbang PAD terbesar. Dengan anggaran yang lebih besar tersebut dapat kemudian digunakan untuk melakukan pembangunan wisata Senggigi. Kendala lainnya adalah bahwa tidak adanya dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dialokasikan, sarana dan prasarana serta infrastruktur jalan yang masih terbatas, kurangnya keterlibatan stakeholder non-pemerintah. Menanggapi kendala tersebut Suhermanto menyarankan agar adanya perbaikan tata ruang, pembangunan/perbaikan sarana prasarana seperti klinik, perbaikan jalan, penjagaan kebersihan lingkungan Senggigi baik di perkampungan maupun di tempat umum seperti trotoar. Apabila hal-hal ini dilakukan maka

tidak hanya akan mendatangkan wisatawan, namun juga mendatangkan investasi ke wilayah Senggigi.

***Peserta 3: Christine Sakinah (LOC)***

Tantangan/kendala yang dihadapi Senggigi: belum adanya pemikiran yang lebih maju dari masyarakat Senggigi khususnya terkait kebersihan. Adanya peluang memajukan Senggigi sebagai ekowisata karena sudah mulai munculnya kesadaran akan sampah plastik, yaitu dengan sistem membuang dan me-recycle sampah. Perlu tindakan dengan memberikan edukasi kepada para pebisnis di wilayah terkait bahaya plastik dan bagaimana mengelolanya. Selain itu kolaborasi antara stakeholders dan pemerintah selaku pembuat kebijakan diperlukan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan festival terkait pengelolaan sampah dan menjual produk recycle atau ramah lingkungan secara online.

***Peserta 4: Mastur (Kades Senggigi)***

Strategi jangka pendek yang dapat dilakukan untuk membangun kembali Senggigi adalah dengan melakukan pembenahan diri dan sinergi membangun desa Senggigi dari para pemangku kebijakan. Kemudian dia melaporkan bahwa dusun Kerandangan dan Mangsit progres pengembangannya sudah berjalan seperti akan diselenggarakannya festival bubur beaq & putiq dan launching atraksi budaya dusun Kerandangan. Menanggapi saran dari Bp. Suhermanto, dia menyampaikan bahwa menaikkan nama Senggigi untuk nama kecamatan agar nama Senggigi lebih dikenal baik itu adalah suatu yang cukup menjadi tantangan karena banyak dan lamanya proses yang diperlukan. Kemudian terkait klinik, dikatakan sudah aktif. Kemudian menanggapi masalah kebersihan dan sampah, dia menyampaikan bahwa sudah terdapat gotong royong bersih-bersih khususnya di dusun Loco, serta sudah tersedianya mesin pencacah sampah. Namun, memang masih kurangnya edukasi terkait sampah dan pengolahannya tersebut. Oleh sebab itu masih membutuhkan dukungan dari LOC dan komunitas lainnya.

**Respon peserta diskusi:**

- Suhermanto (ketua APH): menyampaikan bahwa beliau telah memiliki link ke BI (kepala BI) untuk mendapatkan dukungan terkait pengelolaan sampah melalui pengadaan alat hasil dari CSR BI, semoga dapat dimanfaatkan oleh pihak pemerintah desa dan komunitas LOC dan pihak lainnya, berikutnya mau mengajukan ke Pertamina.
- Christine Sakinah (LOC): menyampaikan kesiapannya untuk memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah
- Amsiah (ketua BPD Senggigi): menyampaikan respons terhadap materi Bp. Saufi terkait perjalanan bisnis tanpa dana. Pasar tradisional bisakah berjalan tanpa uang? Triknya apa

agar bisa diaplikasikan di Mangsit di era pandemi guna mengangkat ekonomi masyarakat?

- Akhmad Saufi (Dosen UNRAM): merespons pertanyaan Amsiah, yaitu dengan penyelenggaraan lomba dan event. Misalnya dengan mengadakan lomba ngampet di dusun terkait dan minta sponsor dari Pertamina dll. Adakan Lomba seperti lomba sepeda di bukit yang penyelenggaranya harus dilaksanakan oleh masyarakat agar lebih mengakar, jangan berpangku kepada EO Jakarta/ yang terkenal, oleh sebab itu dibutuhkan 'champion desa/dusun' atau keterlibatan Pokdarwis. Semua proses pasti akan ada trial and error, up and down, oleh sebab itu dibutuhkan jiwa kewirausahaan, kreativitas dan resiliansi terutama di tahapan awal. Planning dan eksekusi itu penting!

#### ***Peserta 5: Perwakilan LCC***

Menyampaikan terdapat 3 elemen penting dalam kolaborasi pembangunan kembali Senggigi, yaitu: konsep dari akademisi, kreativitas, dan champion/penggerak didalam masyarakat Senggigi. Menyampaikan ketidak setujuannya dengan konsep kegiatan tanpa uang. Menyampaikan bahwa Kades harus mengalirkan dana demi menggerakkan kegiatan misalnya kegiatan pengolahan sampah Pokdarwis.

#### ***Peserta 6: Apriadi (LPAD)***

Menyampaikan pertanyaan "bagaimana membentuk ekosistem pariwisata di Senggigi?". Menyampaikan dari hasil diskusi Karang Taruna, beberapa potensi di Senggigi seperti: Mangsit, Kerandangan, night market di pasar seni, pelepasan penyu, sunset poin dll. Menyarankan bahwa potensi-potensi ini dikemas dan dipaketkan untuk ditawarkan kepada para wisatawan. Selain akan berdampak kepada penyedia layanan paket wisata, namun hal ini akan berdampak positif kepada para pengusaha penginapan karena adanya kemungkinan paket-paket tersebut termasuk layanan penginapan. Kendala dari progres tersebut adalah bahwa hal ini masih wacana/diskusi dan belum sampai dengan tahap eksekusi.

#### ***Peserta 7: Septian (BPD)***

Menyampaikan akan kebutuhan satu konsep yang matang tentang profil pariwisata Senggigi. Sering kali, kegiatan pariwisata tidak dibarengi dengan ketersediaan/dukungan dari pemerintah. Misalnya mengapa tidak ada event sunset di Senggigi, event-event cenderung dilakukan pada malam hari namun lampu jalan saja mati. Kemudian adanya perbedaan konsep yang dibawa dan diperkenalkan oleh usaha Hotel, yang terkadang cukup berbeda dengan konsep wilayah Senggigi. Jadi seperti tidak ada keseragaman konsep. Kemudian Bp. Septian mempertanyakan apa dan siapa sebenarnya pasar dari Senggigi? Beliau juga menyampaikan beberapa keluhan

terhadap pelaku bisnis di Senggigi misalnya bahwa dusun di Senggigi telah memiliki pelabuhan ke Gili, tapi yang dikenalkan oleh para pihak hotel/tour adalah Bangsal. Kemudian menyampaikan juga kebutuhan akan pemberdayaan masyarakat Senggigi yang lebih baik/luas, misalnya dengan meningkatkan pengetahuan wisatawan tentang adanya boat (perahu) yang disediakan masyarakat Senggigi ke Gili atau daerah sekitarnya. Masalah lainnya adalah bahwa Senggigi penyumbang PAD terbesar, namun dalam menjaga keamanan pantai Senggigi (misal dari nelayan luar) dana yang dikeluarkan adalah dari dana desa, mana dana dari pemerintah?. Selanjutnya, Bp. Septian mengharapkan adanya keberlanjutan dari FGD.

***Peserta 8: Khalid (Sekretaris Dispar)***

Respons ke Bp. Septian: memang pandemi ini dirasakan berbagai kalangan masyarakat. Pendanaan pengamanan pantai sudah ada di dinas/desa, kalau di anggarkan oleh pemda lagi maka akan menjadi double account. Kemudian menanggapi terkait lampu jalan, Bp. Khalid menyampaikan bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab Perkim, jadi semua pihak sudah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Apabila ada kebutuhan untuk dana lain maka perlu inisiasi dari masyarakat, kemudian disampaikan ke desa, barulah kemudian ke pemda agar mendapatkan pendanaan tersebut. Kemudian Bp. Khalid menekankan kepada pentingnya kewirausahaan dan menjadi masyarakat sebagai pelopor dalam pariwisata Senggigi. Beliau setuju dengan pengadaan event di Senggigi dan kemudian mengekspos ke media agar tidak hanya bermanfaat kepada masyarakat, namun juga kepada bisnis hotel, restoran, dll. Hal tersebut juga akan memberikan rangsangan kepada wisatawan lokal dan mancanegara agar berkunjung kembali ke Senggigi. Menyarankan masukkan desa wisata Senggigi dalam Musrenbang (saran kepada pak Kades).

**Simpulan Diskusi:**

Mewakili pihak pemerintah daerah Mastur, SE. (Kades Senggigi), menyimpulkan diskusi dengan menekankan pentingnya kerja sama semua stakeholders untuk memajukan pembangunan dan pengembangan Kawasan Pariwisata Senggigi. Disamping itu juga, dia mengharapkan keterlibatan mahasiswa KKN UNRAM bersama-sama dengan pemuda desa Senggigi agar membantu pengembangan Kawasan Pariwisata Senggigi. Di akhir diskusi Khalid (Sekretaris Dispar) menyorakkan hastag Senggigi bangkit kembali (SenggiginReborn) dengan hashtag ***“ayo kembali ke Senggigi!”***

### 4.3. Kondisi dan Permasalahan Pengelolaan Kawasan Pariwisata Sembalun

Peserta diskusi terdiri dari unsur-unsur stakeholders seperti pelaku usaha, petani, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi, dan Masyarakat sebagai berikut:

1. Niadi (Petani dan Pengolah Kopi)
2. Muji (Trekking Organizer) sejak 2013 tapi karena Pandemi beralih ke pertanian
3. Muryanu (Trekking Organizer)  
Sejak Gempa dan Pandemi belum pulih shg beralih ke pertanian sayur-sayuran tapi belum menguntungkan.
4. Noji (Guide dan Porter) tapi beralih ke sektor pertanian sebagai Petani Kopi dan juga sayur-sayuran
5. Amir Riis (Trekking Organizer)
6. Sabur (Sekolah Alam Rinjani)-Camping Ground
7. Ajis (Porter, Guide, Jual Kamar)
8. Bu Laely Farida: Pelaku Usaha Hotel (Lembah Rinjani) *laely farida-channel youtube*

#### **Pemaparan Peneliti (Agusdin, SE., MBA., DBA)**

Pengembangan Pariwisata (Business Survival) di Era Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai aspek termasuk pariwisata khususnya di bidang hotel, restoran, travel, spa dll. Untuk menanggapi hal ini, diperlukan pola pikir yang baik dan kreatif agar dapat berinovasi di era pandemi. Pentingnya melihat peluang dan pembuatan strategi baik strategi jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan platform online di era pandemi ini dan juga melakukan pemetaan kondisi saat ini agar dapat membuat perencanaan yang baik, dan pentingnya peran pemerintah selaku pemangku kepentingan.

Penerapan collaborative governance yaitu kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal. 6 kriteria collaborative governance: forum diprakarsai oleh badan publik; peserta forum terdiri dari aktor non-pemerintah; peserta terlibat dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya "berkonsultasi" forum diselenggarakan secara formal; forum bertujuan untuk mengambil keputusan berdasarkan konsensus; dan fokus kolaborasi pada kebijakan publik atau manajemen publik. Beberapa keuntungan dari collaborative governance, yaitu dapat meningkatkan

pemahaman bersama dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat disepakati solusi, membantu pemerintah mengidentifikasi masalah dari bawah (grassroot), keberterimaan antara stakeholders terhadap keputusan akan lebih tinggi. Sedangkan kelemahannya termasuk: proses memakan waktu, challenge menemukan solusi, mungkin ada manipulasi proses, politik pengambilan keputusan, peran individu menjadi tidak jelas. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan pariwisata saat ini adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan oleh pemerintah sebagai regulator;
- Stakeholders lainnya sebagai mitra pemerintah dan kurang berperan dalam pengambilan keputusan maupun terlibat dalam pengelolaan kawasan;
- Penanganan masalah cenderung bersifat top-down, kurang melibatkan masyarakat atau pemangku kepentingan non-pemerintah;
- Kurangnya kerjasama dan koordinasi antar stakeholders dan cenderung berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi masalah.

## **Hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan Stakeholders pelaku pariwisata**

### **Topik Diskusi:**

1. Apakah skema yang diimplementasikan dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata Senggigi?
2. Apa permasalahan dalam implementasi pengelolaan Kawasan Pariwisata Senggigi?
3. Bagaimana peran pemerintah dan stakeholders dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata Senggigi?
4. Apa strategi yang paling memungkinkan dalam implementasi pengelolaan Kawasan Pariwisata Senggigi?

### **Peserta 1: Amir Riis (Trekking Organizer)**

Amir Riis menanggapi peran pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan Pariwisata Sembalun saat ini sangat luar biasa seperti infrastruktur jalan dan sarana prasarana yang mendukung Kawasan Pariwisata Sembalun termasuk bantuan untuk pelaku kuliner dan petani. Akan tetapi masih terjadi permasalahan dalam pengelolaan sampah yang tidak terorganisir yang disebabkan oleh semakin banyaknya pengunjung Kawasan Pariwisata Sembalun. Sebagian besar pengusaha penerima bantuan pemerintah belum dapat mengelola



dengan baik sesuai dengan peruntukannya, hal ini disebabkan oleh kurangnya analisis terhadap kebutuhan penerima bantuan oleh pemerintah. Permasalahan lainnya adalah hubungan antara pelaku usaha kurang sinkron baik pada usaha yang sejenis maupun usaha yang berbeda, ini artinya bahwa persaingan antar pelaku usaha terjadi secara alamiah, hal ini disebabkan oleh tidak adanya peran dari pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam mendorong kerjasama antar pelaku usaha sehingga tidak terjadinya persaingan yang tidak sehat. Permasalahannya lainnya yang diungkapkan oleh Amir Riis adalah Kebijakan Tata Ruang dari Pemerintah yang belum fixed sehingga penataan Kawasan menjadi cenderung kurang teratur dan tidak tertata dengan baik.

**Peserta 2: Armasih (Barista dan Pengelola Homestay)**

Pak Armasih menyinggung kepedulian pemerintah terutama pemerintah daerah dalam membantu dan mendukung masyarakat yang mengalami kesulitan terutama di masa pandemi Covid-19, justru pihak/stakeholders lain seperti GIZ dan BNPB dukungannya sangat signifikan. Beliau berharap pemerintah kabupaten Lombok Timur atau pemerintah propinsi Nusa Tenggara Barat agar lebih peduli terhadap permasalahan yang dihadapi Masyarakat Sembalun yang terdampak pandemic OVID-19.

**Peserta 3: Muji (Trekking Organizaer dan Petani).**

Pak Muji menyinggung tentang BIP (Bantuan Insentif Pemerintah) dimasa pandemi Covid-19 hanya akses terbatas untuk kalangan tertentu, tidak diberikan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Terkait asosiasi antar pelaku usaha maupun antar unsur masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata Sembalun pak Muji menyatakan sudah banyak asosiasi yang muncul sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti Asosiasi Sembalun Nina, Sembalun Destination Management Organisation (DMO), tapi masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Terkait peran pemerintah daerah, pak Muji menyambut baik peran pemerintah daerah dalam memberikan pelatihan manajemen dan desain, akan tetapi tidak dilanjutkan dengan pembinaan sehingga keberlanjutan implementasi setelah pelatihan menjadi kurang oleh peserta pelatihan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan permasalahan yang terkini di Kawasan Pariwisata Sembalun adalah Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kawasan Pariwisata Sembalun, hal ini akan berdampak jangka panjang pada tata ruang yang tidak teratur dan kurang memperhatikan dampak lingkungan dari pembangunan Kawasan. Disamping itu menurut pak

Muji pengaturan tata niaga pelaku usaha juga belum terlihat peran pemerintah yang menonjol, sehingga dia menyimpulkan masih banyak masalah yang masih memerlukan campur tangan pemerintah dengan melibatkan stakeholders terkait untuk pengembangan Kawasan Pariwisata Sembalun.

#### **4.4. Strategi Pengelolaan Kawasan Pariwisata Senggigi dan Sembalun**

Berdasarkan hasil diskusi terfokus (FGD) dengan stakeholders dapat disimpulkan beberapa hal terkait pengelolaan Kawasan Pariwisata Senggigi dan Sembalun sebagai berikut:

1. Dibutuhkan peran Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) dalam berbagai aspek untuk mewujudkan masyarakat bisa menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri;
2. Berhubung produksi hasil pertanian pada musimnya berlimpah dan sering terjadi *oversupply*, maka dibutuhkan bantuan dan pembinaan petani untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian;
3. Kebijakan RUTR dalam bentuk PERDA agar segera terwujud dan disosialisasikan kepada masyarakat;
4. Diperlukan peran pemerintah yang lebih proaktif untuk mempersatukan para pihak agar berkolaborasi dalam menjalankan usaha agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat;
5. Peran pemerintah juga diperlukan dalam pengaturan pengelolaan dan penguasaan tanah terutama oleh investor dan pihak-pihak luar masyarakat Sembalun;
6. Pengaturan investasi dan penguasaan lahan agar diperlukan pengaturan oleh pemerintah
7. Penyelenggaraan event-event seperti pameran untuk promosi potensi wisata agar lebih banyak difasilitasi oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;
8. Mendorong fasilitas pendanaan untuk modal kerja UMKM dari Perbankan maupun Lembaga Keuangan non-perbankan;
9. Pelatihan “digital marketing” untuk pelaku UMKM dari Pemerintah;
10. Fasilitasi dan bimbingan Media Promosi hasil produk yang paling efisien;
11. Fasilitasi Legalitas Usaha dan label Halal untuk pelaku usaha terutama usaha kuliner dan usaha berbasis makanan dan minuman;
12. Penyiapan Event Calendar reguler (bulanan) untuk media promosi;
13. Peningkatan kemampuan “Online Marketing” pelaku usaha hotel dan usaha pariwisata lainnya

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Simpulan

1. Pengelolaan Kawasan Pariwisata Senggigi maupun Kawasan Pariwisata Sembalun lebih dominan menggunakan pendekatan Top-down (Top-down Approach) dimana peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan kurang melibatkan para pihak (stakeholders) dan masyarakat sekitarnya;
2. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata adalah sebagai berikut:
  - Produksi hasil pertanian pada musimnya berlimpah dan sering terjadi oversupply, maka dibutuhkan bantuan dan pembinaan petani untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian;
  - Kebijakan RUTR dalam bentuk PERDA untuk pengaturan tata ruang
  - Masih lemahnya kolaborasi masyarakat dalam menjalankan usaha dan sering terjadi persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha;
  - Lemahnya peran pemerintah dalam pengaturan pengelolaan dan penguasaan tanah terutama oleh investor dan pihak-pihak luar masyarakat Sembalun;
3. Dibutuhkan peran Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) dan Pemerintah Pusat dalam berbagai aspek untuk mewujudkan masyarakat bisa menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri dengan memperhatikan dan melibatkan pihak-pihak terkait dan masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan pariwisata;
4. Strategi pengelolaan kawasan yang mengadopsi kriteria *collaborative governance* dengan melibatkan para pihak (stakeholders) dan masyarakat setempat menjadi penting agar pengelolaan kawasan pariwisata dapat memenuhi prinsip-prinsip kolaborasi antar stakeholders, masyarakat, dan pendekatan *bottom-up* dalam implementasi kebijakan publik atau manajemen publik.

## 5.2. Rekomendasi

1. Peran pemerintah diperlukan kebijakan RUTR dalam bentuk PERDA dan disosialisasikan kepada masyarakat, bantuan dan pembinaan petani untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian, serta pengaturan pengelolaan dan penguasaan tanah terutama oleh investor dan pihak-pihak luar masyarakat Sembalun, peran pemerintah yang lebih proaktif untuk mempersatukan para pihak agar berkolaborasi dalam menjalankan usaha agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, dan fasilitasi legalitas usaha dan label halal untuk pelaku usaha terutama usaha kuliner dan usaha berbasis makanan dan minuman;
2. Strategi pengelolaan kawasan pariwisata agar melibatkan para pihak (stakeholders) dengan mengadopsi 6 kriteria *collaborative governance* yaitu forum diprakarsai oleh badan publik; peserta forum terdiri dari aktor non-pemerintah; peserta terlibat dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya "berkonsultasi" forum diselenggarakan secara formal; forum bertujuan untuk mengambil keputusan berdasarkan konsensus; dan fokus kolaborasi pada kebijakan publik atau manajemen publik.
3. Fasilitas pendanaan UMKM, penyelenggaraan event-event seperti pameran untuk promosi potensi wisata agar lebih banyak difasilitasi oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, fasilitasi dan pelatihan "digital dan online marketing" untuk usaha hotel dan pendukung pariwisata lainnya, serta penyelenggaraan monthly event calendar dengan melibatkan para pihak dan Masyarakat serta pelaku usaha;

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, John (2012). Collaborative Governance and Metropolitan Planning in South East Queensland - 1990 to 2010: From a voluntary to a Statutory Model. Australian Centre of Excellence for Local Government (ACELG), Sydney.
- Ansell, Chris &, Alison Gash (2008). "Collaborative Governance in Theory and Practice' Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4): 543-571" (PDF).
- Barcon, C., Stratégies touristiques des villes. Un délicat équilibre à trouver. *Tourisme Urbain, Cahier Espaces*, **78**, pp. 54-66, 2003.
- Bramwell, B. (2011). Governance, the state and sustainable tourism: A political economy approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4-5) 459-477.  
<https://doi.org/10.1080/09669582.2011.576765>
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, Stephen Balogh (2012). "An Integrative Framework for Collaborative Governance". *Journal of Public Administration Research and Theory*. 22 (1): 1–29.
- Enriquez-Savagnac, A., The consolidation of the tourism industry: its importance to the global economy”, *Proc. of the 4th International Symposium of World Heritage Cities*, Evora, pp. 98-71, 1997.
- Farmaki, A. (2015). Regional network governance and sustainable tourism. *Tourism Geographies*, 17(3), 385-407. <https://doi.org/10.1080/14616688.2015.1036915>
- Hall, C.M. (2011): Policy learning and policy failure in sustainable tourism governance. From first and second-order to third-order change, *Journal of Sustainable Tourism*, 19, 4-5, 649–671.
- Institute on Governance (2018). Defining governance. Retrieved from <https://iog.ca/what-is-governance/>
- Klůvanková-Oravská, T., Chobotová, V., Banaszak, I., Slavikova, L., Trifunovova, S., Rauschmayer, F., J., Paavola (2009). From government to governance for biodiversity: The perspective of central and Eastern European transition countries. *Environmental Policy and Governance*, 19, 3, 186-196.
- Le Galès, P., *Le Retour des Villes Européennes. Sociétés Urbaines, Mondialisation, Gouvernement et Gouvernance*. Presses de Science-Po: Paris, 2003.
- Liu, J. (2014). From social management to social governance: social conflict mediation in China. *Journal of Public Affairs*, 14, 2, 93-104.
- MacMillan. Polman, N., Reinhard, S., van Bets, L. K., & Kuhlman, T. (2016). Governance of ecosystem services on small islands: Three contrasting cases for St. Eustatius in the Dutch Caribbean. *Island Studies Journal*, 11(1), 265-284.
- Mayntz, R. (2003). New challenges to governance theory, *Governance as social and political communication*, 27.
- Montin, S., & Hedlund, G. (2009). Governance som interaktiv samhällsstyrning—gammalt eller nytt i forskning och politik? In G. Hedlund & S. Montin (eds.). *Governance på svenska* (pp. 7-36). Stockholm: Santérus Academic Press.
- Moscardo, G. (2011). Exploring social representations of tourism planning: Issues of

- governance. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4-5), 423-436.  
<https://doi.org/10.1080/09669582.2011.558625>
- Novelli, M., Schmitz, B., & Spencer, T. (2006). Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience. *Tourism Management*, 27(6), 1141-1152.  
<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.11.011>
- Palmer, A., Evaluating the governance style of marketing groups. *Annals of Tourism Research*, 25(1), pp. 185-201, 1998.
- Paskaleva-Shapira, K., *Innovative partnerships for effective governance of sustainable urban tourism – framework approach*, SUT-Governance Deliverable N°1, 2000.
- Peters, B. G. (2000). Governance and comparative politics. In J. Pierre (ed.). *Debating governance: Authority, steering, and democracy* (pp. 36-55). Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1017/s000305540281036x>
- Pierre, J. (1998). Public-private partnerships and urban governance: Introduction. In J. Pierre (ed.). *Partnerships in urban governance: European and American experience* (pp. 1-10). Hampshire: MacMillan. [https://doi.org/10.1007/978-1-349-14408-2\\_1](https://doi.org/10.1007/978-1-349-14408-2_1)
- Pierre, J. (2000). Introduction: understanding governance. In J. Pierre (ed.). *Debating governance: Authority, steering, and democracy* (pp. 1-10). Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1017/s000305540281036x>
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics, and the state*. Hampshire: Palgrave
- Svensson, B., Vensson, B. & Flagestad, A., A governance perspective on destination development – exploring partnerships, clusters and innovation systems. *Tourism Review*, 60(2), pp. 32-37, 2005.

## Lampiran 1: Biodata Ketua dan Anggota Tim

### KETUA PENELITI

1. **NAME** : **Agusdin**
2. **DATE OF BIRTH** : **August 13<sup>th</sup>, 1964**
3. **NATIONALITY** : **Indonesian**
4. **PERSONAL DETAILS**
  - **Office Address**  
Faculty of Economics Universitas Mataram  
Jl. Majapahit No. 62, Mataram, NTB  
Phone # (0370) 631935  
Master of Management Program  
University of Mataram  
Jl Pendidikan 37 Mataram, NTB  
Phone #(0370) 644929, Fax (0370) 644928
  - **Home Address**  
Jl. Nusa Indah V/C.25, Wisma Sweta Indah,  
Mataram 83233, NTB  
Phone # (0370) 671382; 081 7579 5161  
E-mail # [dragusdin@gmail.com](mailto:dragusdin@gmail.com)
5. **EDUCATION** :
  - **DBA**, in Entrepreneurship, from the Southern Cross University, NSW, Australia, (2000)
  - **MBA**, in Financial and Human Resource Management, Central Queensland University, Australia (1994).
  - **SE**, in Management Science, University of Mataram, Indonesia (1988).
6. **OTHER TRAINING:** :
  - Organizational Behavior, UGM Yogyakarta, 1990.
  - Strategic Planning for PDAM, Jakarta, 2001
  - Training of the Trainer (TOT) for Small Business Development, Bali, 1994
  - Strategic Management in the Global Context, Southern Cross University Australia, 2007
  - ICT based Teaching for Post Graduate Study, Seamolec-DIKTI, Jakarta, 2006.
  - Case-based Teaching Approach in Human Resource Management and Marketing Management, MM UGM Yogyakarta, 2003
  - Case Analysing, MM UGM Yogyakarta, 2007
  - TOT for Hospital Management Training in NTB Province, MM University of Mataram, 2008
7. **LANGUAGE & DEGREE** :
  - Fluent Sasak (Lombok Native Language)

## OF PROFICIENCY

- Fluent Indonesian
- Fluent English

## 8. EMPLOYMENT RECORD :

- a. Date May 2006 – November 2008  
Employer University of Mataram  
Position held Director of Master of Management Program  
Description of duties Managing Post graduate Program in Management field.
- b. Date Dec. 2007 – June 2008  
Employer GTZ SISKEs NTB – NTT, UGM, Tropical Medicine, UNRAM  
Position held Joint Training Coordinator for Hospital Management Training in NTB  
Description of duties Coordinate Hospital Management Training In NTB
- c. Date Dec. 2006 – Jan 2008  
Employer GTZ SISKEs NTB – NTT  
Position held Team Leader  
Description of duties Managing PUSKESMAS Management Training In Mataram and West Lombok District
- d. Date October 2001 – May 2006  
Employer University of Mataram  
Position held Director of SPMU-TPSDP  
Description of duties Managing Sub-project Management Unit of ADB Project at university level
- e. Date **June 2005**  
Employer **The World Bank and PDP Australia**  
Position held **Public Sector Expert (Deputy Team Leader)**  
Description of duties Conduct Civil Service Diagnostics and Roadmaps for Reform in Lombok (Provinsi NTB, Kota Mataram, and Kabupaten Lombok Tengah).
- f. Date **2003 to 2006**  
Employer **Development Planning Board (BAPEDA) of Central Lombok District Government**  
Position held **Adviser and consultant**  
Description of duties Give advice and consultancy to the “Development Planning Board Office (BAPEDA)” in conducting and developing Short Term, Mid Term and Long Term Local Government Development and Strategic Plan’
- g. Date **2003**  
Employer **Provincial Government of the West Nusa Tenggara**  
Position held **Member of the West Nusa Tenggara Provincial**



	Description of duties	<b>Government STRATEGIC PLAN Team</b> Preparation of the <i>Strategic Planning 2003-2008</i> documents for the West Nusa Tenggara Provincial Government
h.	Date	<b>2003 to 2004</b>
	Employer	<b>Provincial Government of the West Nusa Tenggara</b>
	Position held	<b>Chairman of the Provincial Government Organization Restructuring Team</b>
	Description of duties	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identify the current problems faced by the provincial government organization and its human resources (civil servants)</li> <li>▪ Conduct job analysis and design of the current civil servant in the provincial government organization</li> <li>▪ Conduct organization restructuring based on the new Government Regulation (PP 08/2003).</li> <li>▪ Provide recommendation to the Head of Provincial Government (Governor) of the new organization structure and formation as well as human resources (civil servant) reformation policies.</li> </ul>
i.	Date	<b>2001 to 2003</b>
	Employer	<b>Economics and Business Research and Development Institute (LP2EBi).</b>
	Position held	<b>Director and Consultant</b>
	Description of duties	<p>Conducting research, consultancy, and community services and development</p> <p>Research in the field of business and economics areas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Feasibility Study for the establishment of “Rembiga Traditional Market”, Mataram, Dinas Kimpraswil Kota Mataram</li> <li>▪ Strategic Planning Analysis of Local Development in the Era of Autonomy, Bappeda NTB.</li> <li>▪ Sources`of Taxes and Non Taxes Income Generation Analysis in Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram</li> </ul>
j.	Date	<b>2001</b>
	Employer	<b>Central Lombok District Government</b>
	Position held	<b>Adviser</b>
	Description of duties	Give advice on preparation of the <i>Strategic Planning 2001-2005</i> documents for the Central Lombok District Government
k.	Date	<b>2000 to 2002</b>
	Employer	<b>University of Mataram</b>
	Position held	<b>Chairman of the TPSDP Task Force Team for Batch I and II.</b>

Description of duties	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prepare Self Evaluation (SE) Report of university development programs.</li> <li>▪ Prepare Sub-project Proposal and Sub-project Implementation Plan (SIP) of the university development programs.</li> <li>▪ Review proposals submitted by Study Programs within the University.</li> </ul>
l. Date	<b>July 1989 to date</b>
Employer	: <b>Department of Management , Faculty of Economics, University of Mataram</b>
Position held	: LECTURER IN BUSINESS AND MANAGEMENT
Description of duties	: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teaching various undergraduate courses at Management Department, such as Banking Management, Cost Accounting, Entrepreneurship, Organizational Behavior, Job Analysis, Human Resource Management, and Total Quality Management (TQM).</li> <li>▪ Teaching various subjects related to the Human Resources Management field at Masters of Management Program, University of Mataram.</li> </ul>
m. Date	<b>August 1999 to August 2002</b>
Employer	<b>University of Mataram</b>
Position held	<b>Vice Director, Master of Management (MM) Program</b>
Description of duties	Managing Teaching and learning process for Postgraduate study in Management.
n. Date	<b>From August, 1999 to March 2000</b>
Employer	<b>World Bank, Lombok Urban Infrastructure Development Project (LUIDP).</b>
Position held	<b>Urban Economist and Financial Analyst</b>
Description of duties	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Accessing and analyzing Feasibility Study of Urban Infrastructure Development</li> <li>▪ Write report on the Financial and Economic feasibility study and submit recommendation to Local Government in Lombok Areas.</li> </ul>
<b>9. RESEARCH AND PUBLICATION</b>	
2008	<b>Agusdin</b> and Rahman Dayani, Strategi Pengembangan BPR di kabupaten Lombok Tengah, Laporan Penelitian, Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Lombok Tengah.
2007	<b>Agusdin</b> , Pengkajian Potensi Investasi di Nusa Tenggara Barat, Laporan Penelitian, BKPM Provinsi NTB
2006	<b>Agusdin</b> ,. The importance of Financial and Non-financial Support in Facilitating Venture Creation,

*Journal Riset Manajemen*, Master of Management Program University of Mataram

- 2006 **Agusdin** and Ismiwati, Identification of business potential and post harvest product diversification at coastal communities of Ampenan Sub district of Mataram Municipality. *Proceeding of the Research and Studies*, TPSDP DIKTI Project
- 2005 **Agusdin**, The role of government policies and procedures in venture creation process, **Journal Riset Manajemen**, Master of Management Program University of Mataram
- 2004 Dayani and **Agusdin**, Factors influence tourist to visit Senggigi and its surrounding areas. *Proceeding of the Research and Studies*, TPSDP DIKTI Project.
- 2001 **Agusdin**, Study on Investment Potential and Opportunities in Central Lombok Region. Research Report.
- 2001 **Agusdin**, Theoretical and Empirical Analysis on Local Government Human Resources and Institutions. *Paper Presented at the Workshop on Regional Autonomy Organized by KOMPAS National Newspaper*. Mataram.

SIGNATURE :

**(Agusdin)**

DATE OF SIGNING: **04 / 03 / 2021**

Day Month Year

## ANGGOTA PENELITI 1

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Hermanto, MBA
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP	19580723 198903 1 001
5	NIDN	0023075806
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Kopang, 23 Juli 1958
7	Alamat e-mail	hermanto2307@gmail.com <a href="mailto:hary_2307@yahoo.com">hary_2307@yahoo.com</a>
8	Nomor Telepon/Faks/HP	087865327900/081236128408
9	Alamat Kantor	Fakultas Ekonomi Universitas Mataram Jalan Majapahit No. 62 Mataram 83125
10	Nomor Telepon/Fax	(0370) 631935
11	Mata Kuliah yang diampu	1. Operation Research 2. Manajemen Strategi 3. Manajemen Perubahan 4. Strategy MSDM

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Mataram	University of New England, Australia	Universitas Brawijaya, Malang
Bidang Ilmu	Manajemen	Business Administration	Manajemen
Tahun Masuk-Lulus	1978-1985	1994-1995	2010 s/d 2015
Judul	Analisis Kebutuhan	<i>Course Work</i>	Peran Mediasi

Skripsi/Thesis/Disertasi	Modal Kerja Koperasi Pegawai Negeri Sipil Guru Di Kecamatan Cakranegara	(Tanpa Tesis)	<i>Knowledge Management</i> Dalam Hubungan Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Strategi dengan Kinerja Organisasi (Studi Pada PDAM Se-Nusa Tenggara Barat)
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. I Wayan Ruma Ardana	-	Prof. Dr. Moeljadi, SE., SU., MSc.

### C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jmlh (Juta Rp)
1	2015	Peran Mediasi Knowledge Management Dalam Hubungan Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Strategy dengan Kinerja Organisasi (Kajian Pada PDAM di Nusa Tenggara Barat)	Hibah Doktor	46
2	2015	Pengaruh Kepemimpinan Transformasional & Budaya Organisasi Terhadap OCB (Organizational Citizenship Behavior (Kajian Empiris Pada Perusahaan Real Estat di Kota Mataram - NTB)	DIPA BLU (PNBP) Universitas Mataram TA 2015/2016	20
3	2017	Pengujian Hubungan Struktural Citra Destinasi Wisata, Kepuasan Wisatawan dan Loyalitas Wisatawan: Kasus Pulau Lombok	DIPA BLU (PNBP) Unram TA 2017	17
4	2018	Kajian Dampak Kepemimpinan dan	DIPA BLU (PNBP)	19

		Budaya Organisasi terhadap Knowledge Sharing di PDAM Pulau Lombok	Unram TA 2018	
5	2019	Lending relationship dan Dampaknya terhadap Akses Kredit bagi Usaha Kecil dan Mikro: (Studi Pada Usaha Simpan Pinjam oleh Bank Usaha Milik Desa/BUMDes di Pulau Lombok	DIPA BLU (PNBP) Unram TA 2019	19

#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 Tahun terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jmh (Juta Rp)
1	2010	Penyuluhan Tentang Pemberdayaan Masyarakat Pada Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram	Dana Mandiri	-
2	2016	Penyuluhan Pengusaha Kecil di Desa Kekait, Lombok Barat	DPP/SPP TA 2015/2016	5,-
3	2017	Pelatihan Pengidentifikasian Potensi dan Peluang Usaha Bidang Pariwisata Bagi Mahasiswa Program Diploma 3 Pariwisata Program Vokasi Universitas Mataram – Kabupaten Lombok Utara	DANA DIPA-PNBP TA 2017	10,-

#### Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Penerapan Orientasi Pasar dan Strategi Bersaing Pada Hotel Non-bintang di Mataram dan Sekitarnya	Jurnal Riset Manajemen	2010
2	Analisis Kinerja Portofolio Berdasarkan Strategi Portofolio Aktif Dan Pasif Pada Saham LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia	Jurnal Riset Manajemen	2010

## ANGGOTA PENELITI 2

### A. Personal Data

Name	:	Lalu M. Furkan
Place, date of birth	:	Mataram, October 22 <sup>nd</sup> 1978
Address	:	Office: Faculty of Economics and Business University of Mataram. Jl Majapahit 62 , Mataram 83125, Lombok Indonesia. Phone: (0370)631935 Home: Jl Seruling IV no 8 Mataram NTB Indonesia 83126. Mobile: (+62)85926903749 Email: <a href="mailto:lalu.furkan@unram.ac.id">lalu.furkan@unram.ac.id</a> <a href="mailto:lalu.furkan@gmail.com">lalu.furkan@gmail.com</a>

### B. Education and Training Experiences:

Education	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ph.D, Technology Management, Nagoya Institute of Technology- Japan</li> <li>2. MM, Strategic Management, Gadjah Mada University- Indonesia</li> </ol>
Trainings and Workshops	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trainer for Marketing Distributor of Fertilizer Industry, In Colaboration with PT Pupuk Kaltim and PRISMA, Australia</li> <li>2. 2018, Cross Learning Workshop on Establishment of Intermediation Units at University of mataram And University of Jember., In Collaboration wit CSIRO Australia and ARISA</li> <li>3. 2018, International workshop on the Indonesian sea weed industrial cluster such as value chain, human resource and culture, quality, technology, product and market, CSIRO-Australia in collaboration with University of Mataram.</li> <li>4. 2017, Training of Trainers for Advocating village budget in West Nusa Tenggara, Indonesia</li> <li>5. 2017, Advisory on the Village Innovativeness Capabilities in West Lombok area ( in collaboration with Local Government).</li> <li>6. 2011, English for Academic Purposes, Pusat Bahasa UGM</li> <li>7. 2010, TOEFL and GRE Training for Fulbright Program, Fulbright.</li> </ol>

		<p>8. 2009, Agreement for Cooperation ASEAN, Department of Foreign Affair Indonesia.</p> <p>9. 2007, Training of Trainer "Core Consulting Skill for SMEs", MMU Jakarta.</p> <p>10. 2007, Workshop on Business Ethic, KPK Jakarta in Jakarta.</p> <p>11. 2007, Workshop on Business Ethic, KPK Jakarta in Mataram.</p> <p>12. 2007, Training for Financial Consultant of banking industry, Central Bank Mataram</p>
--	--	--

### C. Language Proficiency

Language Proficiency	:	<p>1.Sasak (Fluent)</p> <p>2.Javanese (Fluent)</p> <p>3.English (Fluent)</p> <p>4.Japanese (Fairly)</p>
----------------------	---	---

### D. Work Experiences

1	Date	:	2006-Now
	Employer	:	Faculty of Economics and Business , University of Mataram
	Position	:	Lecturer
	Job description	:	Conducting teaching, Research and Community service
2	Date	:	2015-2017
	Employer	:	University of Mataram-North Lombok local government
	Position	:	Chairman on Tourism department
	Job description	:	Managing the start-up university in coloboration between local government of North Lombok regency and Mataram University to support the emerging tourism industry at North Lombok Regency.
3	Date	:	2018-
	Employer	:	University of Mataram
	Position	:	Chairman of Tourism Department
	Job description	:	Managing the established Diploma of Tourism Program at Mataram Universty



4	Date	:	2007-2017
	Employer	:	Faculty of Economic and Business University of Mataram
	Position	:	Lecturer in business and management
	Job description	:	Teaching and thesis supervisor for various subject such strategic management, human resources, marketing, finance and innovation.

#### E. Experiences as Trainers

1	Date, Year	:	2017
	Institution	:	Pujita in collaboration with local government and UNWTO
	Position held	:	Training facilitator
	Job description	:	Sustainable Tourism Observatory (STO), Encouraging Community participation to establish tourism village in Sesaot, West Lombok
2.	Date, Year	:	2015
	Institution	:	Department of cooperative and small-medium-sized enterprises, West Nusa Tenggara Province
	Position held	:	Training Facilitator
	Job description	:	Giving workshop on strategic management and working capital need analysis
3	Date, year	:	2016
	Institution	:	LPPM-UNRAM
	Position held	:	Training facilitator
	Job description	:	Give training on how to make a business plan to the female groups business
4	Date	:	2016
	Institution	:	Faculty of Economic and Business University of Mataram
	Position held	:	Training facilitator
	Job description	:	Give training on the public speaking

#### F. Experiences as Consultant

1	Date, Year	:	2007 up to Now
	Institution	:	Central Bank Indonesia, Mataram
	Position held	:	Consultant
	Job description	:	Entrepreneurs intermediary to get the funding from the bank industries
2	Date	:	2017
	Institution	:	Regional Planning Agency, West Nusa Tenggara Province
	Position held	:	Consultant
	Job description	:	Evaluation on the middle term development planning of the West Nusa Tenggara province
3	Date	:	2017
	Institution	:	Village Development Agency, Local Government of West Lombok
	Position held	:	Consultant
	Job description	:	Advocating local government to support innovativeness working efforts on the area of west lombok Regency
4	Date, Year	:	2017
	Institution	:	Local Government of North Lombok Regency
	Position held	:	Team Consultant
	Job description	:	Deciding and evaluating project feasibility in North Lombok Regency
5	Date, Year	:	2018
	Institution	:	AECOM, AUS Aid Australia
	Position held	:	Human Resource Specialist
	Job description	:	PRIM Project, Conducting WISN study of West NUSA Tenggara, WLK, Ministry of DPU

#### **G. LIST OF RESEARCH PUBLISHED AND NON-PUBLISHED**

Year	Research Title	Published or Non-Published
2017	Exploring open innovation in the Lombok Industrial Cluster	International Conference on Halal, Authentic, and sustainable Tourism, Senggigi-Indonesia
2015	Managing Innovation in the Indonesian Creative	

	Industrial Cluster	
2015	Identification of Innovation Process among the Indonesian Craft Industry Cluster: -Small and Medium- Sized Tourism Enterprises-	Published-international journal
		Published-International Journal
2015	Current Status of Energy Industry in Serawak, Malaysia	International Conference in Malaysia
2015	Open Innovation in the Indonesian Creative Industrial Cluster	National Conference University of Diponegoro- Semarang
2014	Best Practice of Innovation among the Indonesian craft industry cluster: -Lesson learned from Indonesia-	PICMET international conference 2014 at kanazawa Japan
2013	Identification of Innovation Process among the Indonesian Craft Industry Cluster: -Small and Medium- Sized Tourism Enterprises-	Japanese Society for Production Management 2013
2009	Price behaviour Survey of the Indonesian manufacture Products (Incooperation with Central Bank of Indonesia)	Non-published
2009	Business Activity Survey in West Nusa Tenggara Province( Incooperation with Central Bank of Indonesia)	Non-published
2009	Identification of Central Regulation and District Regulation in order to develop small and medium enterprises in West Nusa Tenggara Province (In cooperation with central bank of Indonesia)	Non- published
2009	Business Plan for Regional Management (In cooperation with local government)	Non Published
2009	Surveyor for Analysis of apparatus of central lombok district government , research report, SCBD project ADB loan of central lombok district government	Non-Published
		Non-Published
2008	Work-load Analysis at the the North Lombok Regency	
2008	Internal-External Analysis for Hotel Holiday-inn Lombok	Published
2008	”Non Performing Loan” study in Bank BPR in West	Non- Published

2008	Nusa Tenggara ( In cooperation with central bank of Indonesia)  SMALL and Medium Enterprises Development Study in Central Lombok ( Incooperation of Local government)	
------	---	--

Lampiran 2: Susunan Organisasi Tim Peneliti

No.	Nama	NIDN	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1.	AGUSDIN, SE, MBA, DBA	0013086403	4	
2.	Dr. HERMANTO, MBA	0023075806	4	
3.	L.M. FURKAN, SE, MM, Ph.D.	<b>0022107804</b>	4	

### Lampiran 3: Surat Pernyataan Ketua Peneliti

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah iniPeneliti/Ketua Peneliti:

Nama : Agusdin, SE, MBA, DBA  
NIP/NIDN : 0013086403  
Pangkat/Golongan : III/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Alamat : Jl. Nusa Indah V/C.25, BTN Sweta Indah. Mataram 83233,  
Lombok-Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul : ***“Strategi collaborative governance dalam pengelolaan kawasan pariwisata di pulau Lombok”*** yang diusulkan dalam skim penelitian yang dibiayai dengan dana PNBPU Universitas Mataram tahun 2021 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh Lembaga/sumber dana lain.**

Bilaman di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mataram, 2021

**Mengetahui:**

**Yang menyatakan,**

LPPM Universitas Mataram,  
**Ketua,**

materai

**Muhammad Ali, Ph.D**  
NIP.19720727 199903 1002

**Agusdin, SE, MBA, DBA**  
NIP.19640813 198903 1001

#### Lampiran 4: Sarana dan Prasarana Penelitian

NO	KOMPONEN BIAYA	ITEM	SAT	VOL	HARGA	TOTAL BIAYA
1	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Kertas A4	1	2	40,000	80,000
2	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Spidol	1	1	50,000	50,000
3	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Pulpen	1	2	35,000	70,000
4	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Souvenir untuk informan kunci	1	40	15,000	600,000
5	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Tinta printer	1	1	50,000	50,000
6	Barang Persediaan	Cartridge printer	1	1	500,000	500,000
7	Pengumpulan data awal	Observasi lapangan	1	3	500,000	1,500,000
8	Pengumpulan data utama	Indept interview	1	3	1,000,000	3,000,000
9	Pengumpulan data utama	Focus Group Discussion (FGD)	1	3	1,500,000	4,500,000
10	HR Pembantu Peneliti	Honor Olah Data	1	1	1,000,000	1,000,000
11	Transport	Transport Peneliti	3	6	500,000	9,000,000
12	Uang harian rapat	Rapat (kantor)	3	6	50,000	900,000
13	Uang harian rapat	Rapat (luar kantor)	3	6	125,000	2,250,000
14	Biaya konsumsi	Konsumsi FGD	1	4	1,000,000	4,000,000
15	Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi	Biaya Pendaftaran dan Publikasi	1	1	5,000,000	5,000,000
16	HKI	Biaya Monograph dan HKI	1	1	2,500,000	2,500,000
<b>TOTAL BIAYA</b>		<b>(Tiga puluh lima juta rupiah)</b>				<b>35,000,000</b>